

Budaya Politik : Partisipasi Masyarakat Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, kabupaten Cirebon

Hendri Suwarsono

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Swadaya Gunung Jati

Alamat: Jl. Pemuda Raya No.32, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

Korespondensi penulis: hendrisuwarsono@ugj.ac.id

Abstract. *Political culture plays an important role in determining the dynamics of general elections, especially in the context of Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia. This research focuses on Ciwaringin Village in Ciwaringin District, Cirebon Regency, which shows low community political participation due to a parochial political culture. People in this village tend to be inactive in the election process, are influenced by the practice of money politics, and choose based on personal closeness and material lures, without understanding the vision and mission of potential leaders. This research uses a qualitative approach with literature study and interview methods to explore the factors that influence political participation, including social, economic, and educational aspects and the use of information media. Findings show that low political literacy and indifference to political issues result in apathy toward elections. Therefore, educational efforts and increasing political awareness are needed to encourage active community participation in the democratic process. It is hoped that this research can contribute to understanding political culture and community participation in Ciwaringin village and promote improvements in implementing the upcoming regional elections.*

Keywords: *Political Culture, Community Participation, Regional Head Elections, Money Politics, Political Education.*

Abstrak. Budaya politik memainkan peran penting dalam menentukan dinamika pemilihan umum, khususnya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Desa Ciwaringin di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang menunjukkan rendahnya partisipasi politik masyarakat akibat budaya politik parokial. Masyarakat di desa ini cenderung tidak aktif dalam proses pemilu, terpengaruh oleh praktik politik uang, dan memilih berdasarkan kedekatan personal serta iming-iming materi, tanpa memahami visi dan misi calon pemimpin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, termasuk aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan penggunaan media informasi. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya literasi politik dan ketidakpedulian terhadap isu-isu politik mengakibatkan sikap apatis terhadap pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran politik untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai budaya politik dan partisipasi masyarakat di desa Ciwaringin serta mendorong perbaikan dalam pelaksanaan Pilkada mendatang.

Kata Kunci: Budaya Politik, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Politik Uang, Pendidikan Politik.

1. LATAR BELAKANG

Budaya politik merupakan suatu faktor fundamental yang memengaruhi dinamika pemilihan umum, termasuk dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di Indonesia, Pilkada dilaksanakan sebagai salah satu bentuk sistem demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerahnya. Dalam proses ini, budaya politik masyarakat berperan penting dalam menentukan hasil pemilihan dan kualitas demokrasi yang berjalan. Budaya politik di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti partisipasi politik, sikap terhadap pemimpin, dan pemahaman masyarakat

mengenai hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Dalam konteks Pilkada, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemilihan yang berkualitas. Masyarakat yang memiliki budaya politik yang baik cenderung lebih aktif dalam mengikuti proses pemilu, mulai dari sosialisasi, kampanye, hingga hari pemilihan.

Namun, budaya politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat literasi politik, di mana banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses dan pentingnya pemilihan. Selain itu, faktor korupsi dan politik uang masih menjadi kendala signifikan yang dapat merusak kualitas demokrasi. Praktik-praktik tersebut sering kali mengakibatkan apatisme di kalangan pemilih, yang pada gilirannya mempengaruhi legitimasi pemimpin terpilih.

Hal ini serupa dengan yang terjadi di desa Ciwaringin. Desa Ciwaringin, yang terletak di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, merupakan salah satu contoh menarik tentang bagaimana budaya politik dapat terwujud dalam sebuah pemilihan umum, khususnya pada Pilkada. Di daerah ini, partisipasi politik warga tidak hanya sekadar kewajiban untuk memberikan suara, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan keterlibatan dalam proses demokrasi yang lebih luas.

Budaya politik di Desa Ciwaringin ditandai dengan kurang antusiasme dari warga dalam mengikuti tahapan Pilkada. Sejak awal, warga desa kurang aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lembaga-lembaga masyarakat. Banyak dari warga desa Ciwaringin tidak mengetahui tentang calon-calon pemimpin Kabupaten Cirebon, bahkan mereka hanya tahu namanya saja. Oleh karena itu, banyak oknum yang menggunakan kepolosan warga desa Ciwaringin untuk kepentingan politik saat pemilihan. Masyarakat terkadang masih terpengaruh oleh praktik politik uang dan janji-janji yang tidak realistis dari calon pemimpin. Beberapa warga mengakui bahwa meski mereka berusaha untuk memilih secara rasional, faktor eksternal seperti iming-iming materi masih memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada perjalanan panjang untuk membangun budaya politik yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk membuat artikel yang berjudul Budaya Politik dalam Pilkada: Partisipasi Warga Desa Ciwaringin di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon tahun 2024. Penulis mengambil masalah utama bagaimana budaya politik dapat mempengaruhi pilihan politik di Masyarakat desa Ciwaringin. Hal tersebut diturunkan menjadi beberapa pertanyaan yakni bagaimana budaya politik di desa Ciwaringin,

bagaimana masyarakat menentukan pilihan politik, dan bagaimana upaya memperbaiki budaya politik di desa Ciwaringin.

Artikel ini memiliki tujuan agar pembaca memahami bagaimana budaya politik di desa Ciwaringin, memahami bagaimana budaya politik dapat mempengaruhi pilihan politik, dan mengetahui bagaimana upaya untuk memperbaiki budaya politik di desa Ciwaringin. Dalam melakukan penulisan artikel ini, penulis memiliki beberapa bahan rujukan yang menjadi penelitian terdahulu yakni buku karya Gustiana. A Kambo yang berjudul Budaya Politik. Buku ini bercerita tentang penggambaran budaya politik secara keseluruhan. Buku karya Prof. Miriam Budiardjo yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Lalu, buku dari Perilaku Politik karya dari Thomas Tokan Pureklolon. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar artikel ini dapat memperkaya penulisan politik tentang budaya politik di desa Ciwaringin, Losari.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Budaya

Budaya adalah suatu konsep yang merujuk pada sekumpulan nilai, norma, kepercayaan, praktik, dan simbol yang dimiliki dan dipraktikkan oleh sekelompok orang atau komunitas. Budaya mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk bahasa, seni, agama, tradisi, dan cara berinteraksi sosial. Budaya juga dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya serta sebagai produk dari sejarah, pengalaman, dan konteks sosial di mana individu atau kelompok tersebut berada.

Menurut Tylor (1871), Budaya atau peradaban, yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya, yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan, menurut Geertz (1973), Budaya adalah sistem yang kompleks dari makna-makna yang dijalin dalam kehidupan sosial, yang memberikan bentuk dan arti bagi pengalaman manusia.

Budaya berfungsi sebagai pedoman dalam cara individu dan kelompok berperilaku, berkomunikasi, serta menjalin hubungan satu sama lain. Selain itu, budaya juga berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal, sehingga menciptakan kekayaan dan keragaman di dalam masyarakat.

B. Politik

Politik adalah proses pengelolaan dan pengaturan kekuasaan dalam suatu masyarakat atau negara untuk mencapai tujuan bersama. Secara lebih luas, politik

mencakup pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu, politik juga melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam menentukan cara distribusi sumber daya, hak, kewajiban, dan kekuasaan.

David Easton (1953) mendefinisikan politik sebagai proses alokasi nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian ini, politik merupakan cara untuk mengatur dan menentukan distribusi sumber daya yang terbatas. Sedangkan, menurut Lasswell (1936) Politik adalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana." Definisi ini menekankan pada aspek kekuasaan dan distribusi sumber daya dalam masyarakat.

Politik tidak hanya terbatas pada aktivitas formal di lembaga pemerintahan tetapi juga mencakup dinamika sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa politik terjadi di berbagai lapisan kehidupan, termasuk dalam organisasi, komunitas, serta di arena publik.

C. Budaya Politik

Budaya politik adalah sekumpulan nilai, sikap, kepercayaan, dan perilaku yang dianut oleh individu atau kelompok dalam konteks kehidupan politik. Budaya ini mencakup pemahaman masyarakat terhadap peran pemerintah, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta sikap terhadap proses politik, termasuk pemilihan umum, partisipasi politik, dan legitimasi kekuasaan.

Menurut Almond & Verba (1963), budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas suatu warga negara terhadap system politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. Sebagai sebuah sistem, organisasi politik (negara) hendaknya memiliki orientasi yang bertujuan mengupayakan kesejahteraan warga negara. Aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan pada adanya fenomena dalam masyarakat tertentu yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat terlepas dari orientasi individu. Artinya, hakikat politik sebenarnya bukan berorientasi pada individu pemegang kekuasaan dalam politik, melainkan kesejahteraan rakyat yang menjadi orientasinya. mengenai objek politik dalam pembahasan mengenai budaya politik menurut Almond dan Verba (1963) mencakup tiga komponen: kognitif, afektif, dan evaluatif. Komponen kognitif digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan

yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki sistem politiknya secara keseluruhan. Budaya politik berfungsi sebagai kerangka referensi yang memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan sistem politik yang ada, serta kontribusi masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan atau sebuah pilihan.

D. Pilkada

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) beserta wakilnya di suatu daerah otonom. Pilkada merupakan salah satu sarana demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin daerah yang akan mengelola pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut.

Pilkada diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Proses PILKADA diatur dalam perundang-undangan dan melibatkan beberapa tahap, termasuk pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. PILKADA bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi politik masyarakat dalam proses pemerintahan daerah. PILKADA dapat diselenggarakan secara langsung oleh rakyat (PILKADA langsung) atau melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, PILKADA dilakukan setiap lima tahun sekali, sejalan dengan masa jabatan kepala daerah yang terpilih.

E. Partisipasi Masyarakat

Arnstein dalam artikelnya yang terkenal, "*A Ladder of Citizen Participation*", mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses di mana warga dapat berkontribusi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dia mengelompokkan partisipasi dalam bentuk tangga, mulai dari "manipulasi" di tingkat terendah hingga "kendali warga" di tingkat tertinggi.

Sedangkan Putnam menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan individu dalam aktivitas sosial dan politik yang bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial, kepercayaan, dan solidaritas dalam masyarakat. Dalam karyanya, ia mencatat bahwa partisipasi yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup dan kinerja pemerintahan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research), di mana data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut tidak terbatas pada buku saja, melainkan juga meliputi jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menghimpun teori, prinsip, dan gagasan yang dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada analisis mendalam terhadap dinamika hubungan antar fenomena serta penarikan kesimpulan secara logis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konteks sosial dan makna yang terkandung dalam data literatur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman secara komprehensif dan interpretatif atas isu yang diteliti.

Dalam kajian ini, teori budaya politik dari Almond dan Verba dijadikan sebagai landasan analisis, khususnya konsep budaya politik parokial. Tiga dimensi utama yang digunakan meliputi kesadaran politik, orientasi komunitas, dan partisipasi politik. Ketiga dimensi ini menjadi kerangka dalam menilai sejauh mana pemahaman, keterlibatan, dan kesadaran masyarakat terhadap sistem politik dan kehidupan bernegara terbentuk melalui dinamika sosial dan budaya setempat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon merupakan desa dengan memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang rendah terhadap dinamika politik dalam pemilihan, pasalnya di desa Ciwaringin apabila calon kepala daerah tidak memberikan uang sogokan maka hal yang akan dilakukan yakni kekosongan terhadap surat suara. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, dilihat melalui karakteristik tingkat partisipasi masyarakat yang rendah desa ini termasuk ke dalam budaya politik parokial.

Masyarakat dengan budaya politik parokial tentu dapat menguntungkan kandidat yang memiliki keterikatan hubungan terhadap warga. Masyarakat desa juga tidak memahami pentingnya visi dan misi serta perdebatan calon kandidat yang

menentukan kepemilikannya dalam bilik. Desa Ciwaringin berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwasanya visi dan misi yang dimiliki calon kandidat merupakan hal yang tidaklah penting. Masyarakat hanya akan memilih kandidat dengan banyaknya jumlah uang yang diberikan terhadap masing-masing keluarga dan kedekatan hubungan keduanya. Hal ini telah terjadi begitu saja saat pemilihan kepala daerah. berdasarkan kesaksian narasumber yang memiliki kedekatan hubungan dengan salah satu kandidat, ketika pilkada serentak dilaksanakan keluarga narasumber memilih kandidat berdasarkan hubungan dan jarak rumah. Narasumber juga menjelaskan alasan mereka melakukannya karena terdapat perasaan tidak enak hati apabila tidak memilih kandidat dengan terjalinnya suatu hubungan, selain itu narasumber beserta keluarga tidak memiliki banyak informasi mengenai kandidat lain. Oleh karena itu, Masyarakat memilih kandidat dengan pertimbangan seberapa banyaknya uang sogokan yang diterima. Selain itu, hal kekerabatan dan tetangga masih menjadi penentu utama dalam hal memilih di desa Ciwaringin.

Serangan fajar atau uang pelicin atau juga uang sogokan merupakan praktik bentuk politik yang merusak demokrasi menjelang pemilihan umum namun menjadi hal yang sangat lumrah untuk dilakukan, semakin besar uang yang diberikan calon kandidat maka semakin besar pula kepemilikan suara yang nanti akan didapatkan. Begitu pula budaya politik yang terlaksana di desa Ciwaringin. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber di masing-masing RT yang berbeda, narasumber yang didapatkan dengan identitas RT yakni RT 13, 14, 19 dan 24. Hasil yang didapat melalui wawancara narasumber untuk pilkada di RT 13 bahwasanya uang yang didapat dari calon kandidat sebut saja kandidat A, yang memberikan serangan fajar 10,000 kepada seluruh anggota keluarga narasumber maka mereka memilih kandidat yang memberikan uang tersebut tetapi untuk keluarga yang tidak mendapatkannya hasil yang didapatkan mengatakan bahwa mereka tidak memilih satu pun calon kandidat yang tersedia dengan kata lain mereka mengosongkan surat suara. Begitu pula keadaan RT 14 dan 19 yang mengatakan bahwa akibat tidak adanya serangan fajar yang dilakukan maka mereka memilih untuk mengosongkan surat suara atau golput. Berbeda dengan RT 24, mereka diberikan serangan fajar langsung dari kandidat serta dimintai KTP identitas mereka melalui kepala RT 24. Golput atau golongan putih merupakan istilah yang ada dalam dunia politik ketika seorang peserta atau pemilih mengosongkan surat suara atau tidak memilih satu pun calon pemimpin.

Selain itu, tokoh agama juga menentukan kehadiran suara dalam bilik, apabila seseorang menjadi pemuka agama maka masyarakat juga akan memilih calon kandidat tersebut. Lalu, faktor yang memperparah adalah rendahnya pendidikan yang dimiliki narasumber dan warga lain membuat acuh terhadap dinamika politik daerah. Namun meskipun begitu, terdapat pemuda yang aktif dan peduli terhadap dinamika politik.

B. Faktor Faktor Partisipasi Masyarakat Desa Ciwaringin

1) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya menyangkut status sosial kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimana lingkungan sosial dan budaya itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan lebih menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lainnya tentu akan juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan untuk itulah mereka ingin berpartisipasi dalam kehidupan politik. Seperti yang diketahui bahwa faktor sosial dan budaya seseorang juga sangat mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Berdasarkan hasil temuan penelitian ditemukan sebagai berikut yaitu, faktor sosial dan budaya dapat mempengaruhi partisipasi pemilih disebabkan dengan adanya lingkungan atau kelompok orang yang memahami tentang politik yang bisa dipercaya oleh masyarakat dari situlah masyarakat ingin ikut memilih karena dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, namun dari sebagian masyarakat masih belum bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang ada masyarakat tersebut berpegang teguh dengan pendiriannya, faktor sosial dan budaya dari lingkungan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Merujuk pada temuan kategori tersebut diketahui bahwa faktor sosial dan budaya yang ada dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Hal ini terlihat pada hasil wawancara bahwasanya sebagian warga dipengaruhi oleh beberapa kelompok politik melalui sosialisasi yang di mana masyarakat menerima amplop sehingga kelompok politik bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih sesuai yang diarahkan. Sebagian masyarakat pun terbuka akan hal itu karena sudah menjadi suatu hal yang lazim setiap adanya PILKADA.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah suatu tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang didasarkan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh sehingga mempunyai peranan pada status sosial seseorang dalam struktur masyarakat. Penghasilan atau pekerjaan tertentu juga dapat menentukan tinggi rendahnya status seseorang (Nasution 1986).

Berdasarkan hasil temuan penelitian ditemukan sebagai berikut yaitu, dari segi faktor ekonomi masyarakat di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon bisa dikategorikan kurang baik, karena masih terdapat beberapa generasi muda usia sekitar 18 sampai 26 tahun minimnya keterampilan sehingga membuat mereka tidak mempunyai pekerjaan yang mampu mereka kerjakan sebagai mata pencaharian dan terdapat juga beberapa masyarakat usia 30 sampai 38 tahun yang di mana masih belum memiliki penghasilan tetap. Dengan demikian hal ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Ciwaringin pada PILKADA 2024.

Berdasarkan hasil wawancara sebagian masyarakat menerima beberapa amplop dan sembako sebagai bentuk dorongan oleh kelompok politik untuk mempengaruhi masyarakat sehingga hal ini menjadi celah bagi praktik politik uang. Berapa warga menganggap sebagai bentuk bantuan dari pada pelanggaran demokrasi. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman mengenai etika politik.

3) Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Siti (2010) pendidikan politik hanya diberikan pada saat akan melaksanakan pemilu saja, mengakibatkan masyarakat usia manula maupun pemilih pemula akan mengakibatkan masyarakat tidak akan sadar untuk melakukan hak pilihnya. Pendidikan politik sangat penting sehingga diperlukan untuk adanya sosialisasi, namun jika pendidikan politik ini sudah ada pasti masyarakat akan menyadari hak dan kewajibannya untuk memilih.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat dalam masyarakat berpartisipasi dilihat dari masyarakat Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon memiliki pendidikan yang baik namun cukup beragam karena dilihat dari latar belakang pendidikan masyarakat Desa Ciwaringin ini cukup berbeda-beda dari generasi ke generasi, usia masyarakat yang memiliki hak suara pemula sekitar 18 sampai 25 tahun mendapatkan pendidikan yang baik. Namun berbeda dengan pendidikan politik

masyarakat hanya tahu bahwa politik itu tidak penting, pendidikan politik ini sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam merubah persepsi masyarakat terhadap politik agar masyarakat ingin menggunakan hak pilihnya. Dalam mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat memang pemerintah setempat harus ikut andil dalam memberikan pendidikan politik agar masyarakat mengetahui apa kegunaan dari politik dan pentingnya ikut serta dalam kegiatan pemilu maupun pilkada yang ada. Agar partisipasi di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon lebih meningkat dari tahun ke tahun.

4) Faktor Media Informasi

Media sosial merupakan platform yang memiliki tujuan pada pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Dan media sosial ini memiliki keterkaitan dengan komunikasi politik, dengan menggunakan media sosial, terutama dalam kampanye pemilu. Kemampuan dalam menciptakan ruang diskusi di antara politisi dengan masyarakat serta menarik perhatian pemilih pemula/pemilih muda membuat media sosial sangat diutamakan bagi politisi dalam berkampanye politik. Dalam konteks politik, media sosial digunakan sebagai alat kekuasaan yang mudah digunakan karena kemampuannya supaya bisa menarik dan mengarahkan perhatian, mengajak pendapat dan anggapan mempengaruhi pilihan masyarakat, serta membuat masyarakat melakukan partisipasi politik dalam Pilkada 2024.

Dalam Pilkada 2024 di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, berdasarkan hasil penelitian ini, masyarakat menjelaskan bahwa media sosial merupakan sarana yang inti dalam mendapatkan informasi terkait kampanye politik dalam Pilkada 2024. Dengan adanya media sosial bisa mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi politik dalam Pilkada 2024 akan tetapi kelemahan dari media sosial adalah bisa menyerap semua informasi sehingga informasi yang didapatkan masyarakat Desa Ciwaringin bisa berpotensi tidak benar dan atau belum (Hoaks), dengan hal ini masyarakat diharapkan mampu bijak untuk menggunakan media sosial tersebut agar bisa menciptakan politik yang damai tidak terjadinya pecah belah hanya karena mendapatkan informasi yang belum akurat.

C. Budaya Politik Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon

Menurut dari observasi dan penelitian yang kami lakukan selama sebelum dan sesudah pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024 terakhir di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon kami dapat menarik kesimpulan bahwa

budaya politik yang dominan dimiliki masyarakat lokal adalah budaya politik Parokial atau *Parochial Political Culture*. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba sendiri budaya politik adalah pola orientasi individu terhadap sistem politik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan *evaluative*. Dan menurut mereka budaya politik dapat menjadi tiga tipe utama yaitu:

1. Budaya Politik Parokial (*Parochial Political Culture*)

Yang memiliki ciri-ciri: Warga masyarakat memiliki kesadaran politik yang sangat rendah. Mereka tidak memahami atau terlibat dalam sistem politik secara langsung. Contoh: Biasanya ditemukan dalam masyarakat tradisional atau pedesaan yang terpencil, di mana perhatian mereka lebih fokus pada urusan keluarga atau komunitas kecil daripada isu nasional.

2. Budaya Politik Subjek (*Subject Political Culture*)

Memiliki ciri-ciri: Warga memiliki kesadaran politik tetapi cenderung pasif. Mereka menerima otoritas pemerintah dan jarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya: Masyarakat dengan sistem otoritarian, di mana warga hanya mematuhi keputusan pemerintah tanpa merasa memiliki pengaruh terhadap kebijakan.

3. Budaya Politik Partisipan (*Participant Political Culture*)

Ciri-cirinya: Warga memiliki kesadaran politik yang tinggi, aktif dalam proses politik, dan merasa bahwa mereka memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Mereka memahami hak dan tanggung jawab politiknya. Contoh: Biasanya ditemukan dalam masyarakat demokratis yang maju.

4. Dan terakhir Budaya Politik Campuran (*Civic Culture*) Almond dan Verba juga memperkenalkan konsep budaya politik campuran, yaitu kombinasi dari ketiga tipe budaya politik. Budaya politik yang ideal untuk demokrasi adalah yang memiliki keseimbangan antara parokial, subjek, dan partisipan. Ini menciptakan stabilitas politik dengan tetap memberikan ruang bagi partisipasi warga tanpa mengabaikan tradisi lokal.

Dari beberapa tipe budaya politik yang telah dijabarkan menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba yang paling cocok dengan budaya politik masyarakat desa Ciwaringin adalah budaya parokial hal ini dikarenakan ciri khas budaya ini yang memandang politik sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka, tetapi mereka tetap mematuhi arahan otoritas lokal, seperti arahan dari pak RT/RW atau pemimpin lokal lain setempat seperti pemuka agama atau dari keluarga. Di

desa Ciwaringin masyarakat memiliki kesadaran politik yang sangat rendah dan mereka tidak memahami atau terlibat langsung dalam politik secara langsung, hal ini di buktikan saat kami melakukan observasi mendalam sebelum pilkada 2024 terakhir. Kami melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat lokal dari beberapa kelompok dan beberapa RT.

Kami melakukan wawancara dengan bergabung dan melakukan sebuah obrolan terkait pilkada 2024 terakhir, beberapa kelompok tersebut adalah kelompok para pemuda dari desa Ciwaringin dan mereka terdapat dari berbagai RT, salah satunya dari RT 13 dan perkiraan umur mereka adalah 19 sampai dengan 30 tahun dan kami menanyakan pemilihan pilkada dan apakah mereka sudah menentukan pilihan mereka. Lalu salah satu dari pemuda itu menjawab: “saya si nanti akan golput (tidak akan memilih) sil, kalo gak ada uang pelicin, buat apa milih calon-calon begituan, toh kita tetep begini-begini saja”

Hal ini pun di setuju oleh semua pemuda yang ada disana. Hal ini, dapat diartikan mereka tidak akan bergerak dalam sebuah politik jika tidak ada penggerak mereka, mereka menunggu serangan fajar dan akan melihat calon pasangan mana yang akan memberikan mereka uang yang lebih besar dan maka mereka akan memilih calon tersebut. Saya juga bertanya pada para pemuda, apakah kalian mengetahui terkait visi dan misi para calon Gubernur dan Bupati terkait dan apakah kalian mengetahui jika suara yang kalian adalah hal yang penting dan memiliki pengaruh yang penting. Dan salah satu pemuda menjawab: “aku si gak liat debat para calon dan gak tau nama-nama mereka apalagi visi dan misi mereka, gak pentinglah tau hal begituan yang penting ada uang pelican baru kita nyoblos”

Hal ini juga disetujui oleh setengah para pemuda, akan tetapi beberapa dari pemuda mereka menjawab jika mereka mengetahui seberapa penting suara mereka. Dan setelah saya tanyakan pendidikan mereka, mereka orang-orang lulusan SMA/SMK sederajat, memang sangat penting pendidikan dalam menentukan apakah seseorang melek politik atau tidak seperti yang telah dijelaskan pada poin-poin faktor. Tetapi sangat disayangkan walaupun mereka tau tentang seberapa penting dan pengaruhnya suara mereka, mereka sangat pasif dan acuh. Mereka sama seperti para pemuda lain yang akan memilih golput (tidak akan memilih pasangan manapun) jika tidak diberi serangan fajar. Dan pada akhirnya setelah sampai pada hari dimana Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) berlansung para pemuda kompak tidak memilih pasangan manapaun atau golput.

Pertanyaan-pertanyaan diatas kami tanyakan juga pada para ibu rumah tangga disana dan para pemuda yang berkisaran berumur 18 sampai 25 tahun dan kami mendapatkan jawaban yang tidak jauh berbeda seperti para pemuda diatas, jika para ibu-ibu disana tidak mengetahui apapun tentang para calon Bupati dan tidak mengetahui seberapa besar pengaruh suara mereka dalam menentukan para pemimpin, akan tetapi mereka tetap pergi ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang disediakan oleh Pemerintah Desa Ciwaringin, untuk memberikan suara mereka untuk salah satu calon pasangan Bupati. Mereka hanya memenuhi tugas mereka yang harus memilih salah satu calon pasangan Bupati dan tanpa mengetahui siapa dan apa visi misi para calon pasangan di Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024 terakhir.

Para pemuda atau remaja putri di Desa Ciwaringin khususnya RT 13 dan RT 14 mereka juga tidak jauh berbeda dari ibu-ibu yang memilih calon tanpa mengetahui nama ataupun visi dan misi para calon pasangan di Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024 terakhir, bahkan sebagian dari mereka yang tidak memilih pasangan manapun karena mereka berfikir jika politik itu hal yang tidak terlalu penting dan menganggap hal tersebut bukan urusan mereka. Para remaja putri di desa Kalisasi yang memilih tidak memilih salah satu calon pasangan Gubernur dan Bupati cukup acuh dan sangat pasif terhadap politik, tidak jauh berbeda dengan para pemudanya hanya saja para remaja putri atau pemuda di Desa Ciwaringin tidak mengharapkan serangan fajar, mereka cukup tidak peduli dengan hal seperti itu.

Pada kesimpulan yang kami dapatkan dalam proses penelitian dan wawancara pada beberapa kelompok dan RT, kami mendapatkan hasil jika di RT 19 tidak adanya serangan fajar tetapi warga tetap memilih calon pasangan Gubernur dan Bupati, di RT 24 terdapat serangan fajar dan langsung dari Kuwu sendiri yang memerintahkan untuk para warga memilih salah satu dari calon pasangan Gubernur dan Bupati, di RT 13 sebagian mendapatkan serangan fajar dan ada juga yang tidak mendapatkan serangan fajar karena itu banyak yang tidak memberikan hak suaranya, dan terakhir kami melakukan wawancara di RT 14 tidak ada serangan fajar dan banyak yang memilih untuk tidak memberikan suara mereka dan menganggap jika Pilkada hanya hal yang membuang-buang waktu dan tidak memiliki pengaruh terhadap hidup mereka. Karena beberapa hal di atas sangat dapat dipastikan jika budaya politik didesa Ciwaringin adalah dominan Parokial karena kesadaran akan politik mereka sangat rendah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi politik masyarakat Desa Ciwaringin, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, sangat dipengaruhi oleh budaya politik parokial yang berkembang di sana. Masyarakat cenderung menganggap politik sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari, hanya terlibat dalam proses pemilihan berdasarkan uang sogokan atau kedekatan personal dengan calon, tanpa memperhatikan visi dan misi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman politik menghambat keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik ini adalah faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Kondisi sosial dan budaya yang kurang mendukung pemahaman politik, ditambah dengan kondisi ekonomi yang sulit, menjadikan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh praktik politik uang. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan politik juga memperburuk ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.

Meskipun media sosial memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran politik, penggunaannya belum maksimal. Banyak informasi yang diterima oleh warga sering kali tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Hal ini memperburuk pemahaman politik yang seharusnya dapat mendorong partisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi. Sebagai akibatnya, budaya politik parokial terus mendominasi, menciptakan siklus ketidakaktifan politik yang sulit untuk diputuskan. Secara keseluruhan, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat Desa Ciwaringin agar mereka memahami peran mereka dalam demokrasi. Dengan upaya yang tepat, diharapkan masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu, tidak hanya berdasarkan keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan bersama.

Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Ciwaringin, penting untuk mengadakan program pendidikan politik yang komprehensif. Program ini tidak hanya mengajarkan prosedur pemilihan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai visi dan misi calon serta dampaknya bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berdasarkan informasi yang jelas. Selain itu, sosialisasi melalui berbagai kelompok masyarakat, seperti pemuda dan tokoh agama, dapat memperluas jangkauan informasi politik secara lebih efektif. Kolaborasi dengan kelompok-kelompok ini penting untuk menyampaikan pesan-pesan

politik yang relevan dan membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Penggunaan media sosial juga perlu dioptimalkan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara memilah informasi yang benar dan menghindari hoaks.

Selanjutnya, untuk menciptakan pemilihan yang lebih adil dan transparan, penegakan hukum terkait praktik politik uang harus lebih diperkuat. Pemerintah dan lembaga terkait harus serius dalam memberantas praktik korupsi politik yang merugikan demokrasi. Dengan menegakkan hukum yang tegas, masyarakat diharapkan dapat lebih yakin bahwa suara mereka akan dihargai dan dipertimbangkan dengan adil. Akhirnya, dengan adanya peningkatan kesadaran politik yang didukung oleh edukasi dan informasi yang akurat, masyarakat Desa Ciwaringin diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pemilihan umum. Ini akan berkontribusi pada proses demokrasi yang lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang lebih kompeten dan memahami kebutuhan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Easton, D. (1953). *The political system: An inquiry into the state of political science*. Knopf.
- Effendi, R. (2015). *Budaya politik: Sebuah pengantar*. Rajawali Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Hofstede, G. (1980). *Culture's consequences: International differences in work-related values*. Sage Publications.
- Javanica, A. (2020). *Media sosial dan partisipasi politik: Studi kasus pemilih muda di Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Keesing, R. M. (1974). *Cultural anthropology: A contemporary perspective*. Holt, Rinehart and Winston.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who gets what, when, how*. Whittlesey House.
- Norris, P. (2002). *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge University Press.
- Nugroho, R. (2018). *Politik uang dalam pemilihan umum: Tantangan dan solusi*. Gadjah Mada University Press.

- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Putra, I. (2019). *Literasi politik: Kunci pembangunan masyarakat sipil*. Airlangga University Press.
- Pye, L. W., & Verba, S. (Eds.). (1965). *Political culture and political development*. Princeton University Press.
- Siregar, N. (2017). *Dinamik kenegaraan dan demokrasi di Indonesia*. Alfabeta.
- Tylor, E. B. (1871). *Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom*. John Murray.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.